

ANALISIS DINAMIKA EKONOMI KOREA UTARA MENGGUNAKAN STATE-LED DEVELOPMENT THEORY: STUDI KASUS ARTIKEL BERITA ONLINE JANUARI 2022-JUNI 2024

Satya Putri Djawas¹, Annisa Syifa Qulbiyah², Nuraini³, Reynaldi Roskhova Ravly⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: satyaputridjawas.2236030007@gmail.com¹; anisasyf02@gmail.com²;
nuraini022805@gmail.com³; reynaldirr2236030009@gmail.com⁴

ABSTRAK

Studi ini menganalisis strategi pembangunan ekonomi Korea Utara (DPRK) melalui kerangka *state-led development*, dengan fokus pada keseimbangan antara prioritas politik-keamanan dan kebutuhan ekonomi. Korea Utara mempertahankan model pembangunan yang sangat terpusat, mengutamakan sektor pertahanan, dan membatasi investasi asing serta keterlibatan pasar global. Meskipun terdapat upaya diversifikasi ekonomi dan modernisasi infrastruktur industri, efektivitas intervensi negara sering terbatas oleh sanksi internasional, pandemi, dan keterbatasan kapasitas administratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa model *state-led development* di Korea Utara berhasil mempertahankan kontrol negara atas sektor strategis, namun kurang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Peran Tiongkok sebagai mitra dagang utama dan kerjasama dengan Rusia juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Studi ini menegaskan bahwa pembangunan yang dipimpin negara di Korea Utara menekankan keamanan dan kemandirian politik, sementara pencapaian ekonomi dan kesejahteraan sosial masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan.

Kata Kunci: Korea Utara; *State-led development*; Analisis Konten

ABSTRACT

This study examines North Korea's (DPRK) economic development strategy through the lens of state-led development, focusing on the balance between political-security priorities and economic needs. North Korea maintains a highly centralized development model, prioritizing defense sectors and limiting foreign investment and global market engagement. Despite efforts to diversify the economy and modernize industrial infrastructure, state

interventions are often constrained by international sanctions, the COVID-19 pandemic, and administrative capacity limitations. The analysis shows that the state-led development model allows the government to retain control over strategic sectors, yet fails to significantly improve citizens' welfare. China's role as a key trade partner and cooperation with Russia are crucial for sustaining economic stability. The study concludes that North Korea's state-led development emphasizes security and political autonomy, while economic performance and social welfare continue to face significant structural challenges.

Keywords: North Korea; State-led Development; Content Analysis

Pendahuluan

Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea, DPRK) merupakan objek studi yang khas dalam kajian ekonomi politik karena kombinasi kebijakan ekonomi yang sangat terpusat, tekanan sanksi internasional, dan prioritas rezim yang menempatkan keamanan serta kelangsungan politik di atas tujuan pembangunan kesejahteraan massal. Secara formal, Korea Utara mempertahankan mekanisme perencanaan terpusat, termasuk target produksi dan alokasi sumber daya yang ditetapkan oleh negara, di mana hal ini selaras dengan doktrin Juche yang menekankan kemandirian nasional (FAO, 2013; FAO, n.d.). Dalam realitas di lapangan, bagaimanapun, menunjukkan adanya ketegangan yang konsisten antara narasi resmi peningkatan kapasitas dan indikasi kekurangan pangan, gangguan rantai pasok, serta kerentanan ekonomi yang diperparah oleh sanksi internasional (FAO, 2013; ReliefWeb, 2019).

Khusus pada sektor pangan dan ketahanan pangan, laporan lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan secara konsisten menunjukkan bahwa produksi pangan Korea Utara berada di bawah kebutuhan dasar nasional dan rentan terhadap fluktuasi cuaca ekstrem serta keterbatasan input pertanian (FAO, 2013; FAO, n.d.). Analisis terbaru juga menyorot bagaimana pandemi COVID-19 dan pembatasan perbatasan memperburuk akses terhadap input impor (pupuk, mesin) dan mengganggu distribusi pangan, sehingga kerentanan sosial-ekonomi meningkat (FAO, n.d.; ReliefWeb, 2019). Di samping itu, pemberlakuan dan pengetatan sanksi internasional, terutama yang diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB, turut mempengaruhi akses Korea Utara ke pasar energi, logistik

internasional, dan komoditas ekspor penting, menekan ruang fiskal dan kapasitas investasi negara (UN Security Council, 2023).

Di ranah kebijakan makro, pemerintah Korea Utara juga secara konsisten memprioritaskan pembiayaan sektor pertahanan dan program militer strategis, termasuk pengembangan program nuklir dan rudal balistik. Prioritas ini memengaruhi alokasi anggaran negara secara signifikan dan menimbulkan trade-off antara belanja keamanan dan kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi (Revere, 2021; CSIS, n.d.). Pendekatan prioritas keamanan seperti ini menimbulkan dilema: pemerintahan republik yang menempatkan negara sebagai aktor pembangunan utama (state-led) tetapi dengan orientasi strategis yang lebih bersifat politis-militer dibandingkan ekonomi-produksi, menghasilkan pola pembangunan yang berbeda dari contoh negara pembangunan (developmental state) yang "sukses" lainnya di kawasan Asia Timur.

Teori developmental state (Johnson, 1982) menekankan peran kuat dari negara, dengan birokrasi relatif otonom, koordinasi kebijakan industri, dan prioritas jangka panjang, dalam melakukan mobilisasi sumber daya menuju proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi (Johnson, 1982; Song, 2006). Beberapa prinsip tersebut tampak pada Korea Utara: pemerintah mengontrol alokasi sumber daya, menetapkan sektor prioritas, dan merumuskan rencana-rencana pembangunan berskala nasional. Namun penerapan di Korea Utara berbeda secara substansial dari model yang diterapkan oleh Jepang maupun Korea Selatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada tiga faktor struktural utama: (1) orientasi kebijakan yang memprioritaskan sektor keamanan, (2) adanya isolasi internasional dan sanksi sehingga membatasi akses Korea Utara terhadap sumber daya teknologi dan modal, serta (3) keterbatasan kapasitas administratif dan infrastruktur sehingga melemahkan efektivitas intervensi negara (Noland, 2022; UN Security Council, 2023).

Tiongkok menjadi mitra dagang utama bagi Korea Utara, di mana Tiongkok memasok sebagian dari impor energi Korea Utara, pangan, maupun barang konsumsi (Noland, 2022; FAO, n.d.). Ketergantungan ekonomi yang bersifat asimetris ini memberi Tiongkok sebuah *leverage* geopolitik sekaligus menyediakan kebutuhan hidup ekonomi bagi Korea Utara. Sejak 2022, dinamika baru muncul dalam hubungan Korea Utara-Rusia,

di mana terjadinya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan dukungan logistik, di mana hal ini merupakan respons pragmatis dari Pemerintah Korea Utara atas tekanan Barat dan adanya kebutuhan diversifikasi mitra bagi Korea Utara (CSIS, n.d.; Bennett, 2023).

Secara domestik, Korea Utara menghadapi hambatan struktural, khususnya pada sektor pertanian dan industri dalam negerinya. Produktivitas pertanian dibatasi oleh infrastruktur irigasi yang masih mengandalkan teknologi tradisional/konvensional, adanya keterbatasan pupuk dan energi, serta degradasi lahan di beberapa daerah di Korea Utara. Pada sektor industri, Korea Utara menanggung permasalahan pada pasokan listrik, akses teknologi, dan kurangnya modal (FAO, 2013). Pemerintah merespons melalui program-program pembangunan yang terarah, misalnya dengan upaya pembangunan fasilitas produksi modern di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, efektivitas dan cakupannya dipertanyakan karena adanya kekurangan input, sanksi, dan kapasitas implementasi yang terbatas (Noland, 2022).

Selain itu, kondisi ini memunculkan adanya pergerakan barang lintas perbatasan informal (terutama dengan Tiongkok), pasar domestik, dan mekanisme swadaya lokal yang menjadi elemen vital bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian banyak keluarga di Korea Utara (FAO, n.d.; ReliefWeb, 2019). Fenomena ini juga menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah Korea Utara secara resmi menegakkan kontrol ketat, praktik ekonomi sehari-hari di Korea Utara sering kali bersifat hibrid antara logika perencanaan negara dan mekanisme pasar lokal.

Dengan latar tersebut, studi ini mengambil kerangka *state-led development* untuk menganalisis bagaimana Korea Utara merancang dan melaksanakan strategi pembangunan di bawah kondisi isolasi dan prioritas keamanan yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan adanya investigasi atas interaksi antara kapasitas negara (*state capacity*), orientasi kebijakan (*security vs. welfare*), hubungan eksternal (perdagangan dan diplomasi), serta praktik informal yang mengisi celah keberlanjutan ekonomi. Secara khusus, fokus analisis diarahkan pada: (1) bagaimana negara menyeimbangkan tujuan politik-keamanan dan kebutuhan ekonomi; dan (2) batas-batas efektivitas intervensi negara dalam konteks sanksi dan keterbatasan kapasitas administratif.

Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan melakukan studi dan investasi atas berbagai sumber sekunder seperti laporan media internasional, analisis lembaga penelitian, jurnal akademik, data ekonomi regional, dan dokumen resmi pemerintah terkait dinamika ekonomi Korea Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola kebijakan, strategi negara, dan isu-isu dominan yang relevan dengan model pembangunan yang dipimpin negara.

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan tematik terhadap isu-isu seperti kontrol ekonomi, kebijakan industri, ketahanan pangan, sektor pertahanan, dan hubungan ekonomi eksternal dari Korea Utara yang muncul pada pemberitaan pada periode Januari 2022 hingga Juni 2024. Validitas analisis diperkuat dengan triangulasi sumber dari institusi kredibel seperti BBC, Kompas, Antara, serta jurnal akademik dan lembaga riset internasional. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Korea Utara menjalankan proses pembangunan ekonomi dan bagaimana strategi tersebut dapat dianalisis melalui kerangka teoretis *state-led development*.

Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan pada studi ini merujuk pada konsep *state-led development* yang diperkenalkan oleh Chalmers Johnson (1982). Konsep ini menjelaskan keberhasilan industrialisasi Jepang melalui peran negara yang kuat dan terencana. Johnson menekankan bahwa dalam *developmental state*, negara bukan sekadar regulator, tetapi aktor utama yang memimpin proses pembangunan melalui perencanaan jangka panjang, birokrasi yang kompeten, dan intervensi strategis dalam sektor-sektor kunci (Johnson, 1982; Song, 2006). Model negara pembangunan dicirikan oleh beberapa elemen utama:

1. Birokrasi otonom namun berorientasi pembangunan, yang mampu menjalankan kebijakan tanpa campur tangan politik berlebihan (Song, 2006).

2. Perencanaan industrial dan ekonomi yang terpusat, dengan prioritas yang ditentukan negara untuk mendorong sektor tertentu (UN ESCWA, 2018).
3. Kemampuan negara untuk mengoordinasikan sumber daya nasional dan menggerakkan institusi untuk mencapai tujuan pembangunan (Singh & Ovadia, 2018).
4. Intervensi negara untuk mengatasi kegagalan pasar, termasuk kontrol investasi, arah industri, dan perlindungan sektor strategis (Johnson, 1982).

Hasil dan Pembahasan

State-led Development di Korea Utara dan Kawasan Asia Timur

Negara-negara di Asia Timur, termasuk Korea Utara, masih menunjukkan kecenderungan yang kuat dalam menerapkan model *state-led development* sebagai pendekatan utama dalam mengelola dan mengembangkan ekonominya. Korea Utara masih sendiri masih konsisten dalam menerapkan model pembangunan *state-led development*. Korea Utara menjadi contoh yang tepat dalam hal ini, dengan pemerintahan Kim Jong-Un yang secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kendali negara terhadap perekonomian. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui kerjasama dengan negara lain, seperti kesepakatan dengan Rusia dalam perdagangan senjata, yang bertujuan untuk meningkatkan output ekonomi negara sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertahanan tetap menjadi fokus utama dalam model pembangunan yang dipimpin oleh negara.

Meskipun muncul tantangan dan kegagalan dalam mencapai target ekonomi yang telah ditetapkan, pemerintah Korea Utara tetap mempertahankan kendali erat atas sektor-sektor kunci seperti industri pertahanan dan pertanian. Investasi yang signifikan dialokasikan untuk sektor pertahanan dan keamanan, mencapai 45 persen dari total belanja negara, yang mencerminkan prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan internal.

Pemerintah Korea Utara juga menunjukkan komitmen terhadap model *state-led development* melalui langkah-langkah konkret seperti memperkuat kerja sama dengan negara lain, terutama dalam perdagangan senjata dengan Rusia untuk meningkatkan basis industri militer mereka. Selain itu, Korea Utara juga mengambil langkah-langkah

untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi secara mandiri, meskipun dengan dukungan dari negara-negara seperti Uni Soviet dan Tiongkok di masa lalu. Program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara dengan bantuan Tiongkok pada tahun 1964 menunjukkan upaya mereka untuk menjadi otonom dalam bidang teknologi dan keamanan. Sistem pemerintahan yang terpusat di sekitar satu partai politik, yaitu Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, juga menekankan kontrol pemerintah yang kuat dalam mengatur dan mengembangkan ekonomi.

Secara keseluruhan, Korea Utara dan mungkin negara-negara lain di Asia Timur tetap mempertahankan model *state-led development* sebagai landasan utama dalam mengelola ekonomi. Model *state-led development* menandai dominasi pemerintah dalam mengarahkan sumber daya ekonomi negara untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, terutama dalam mengamankan pertumbuhan ekonomi yang terkendali dan mempertahankan stabilitas politik internal. Meskipun tantangan seperti sanksi internasional dan kegagalan rencana ekonomi tertentu terjadi, pendekatan ini tetap menjadi karakteristik utama dalam pembangunan ekonomi di kawasan tersebut.

Kebijakan Pemerintah Korea Utara yang Menggambarkan *State-led Development*

Pemerintah Korea Utara telah menerapkan berbagai strategi dan kebijakan ekonomi dalam upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah kebijakan ekonomi terpusat dan tertutup, di mana pemerintah berusaha mengendalikan secara ketat seluruh sektor ekonomi dan meminimalkan ketergantungan pada pasar global. Hal ini tercermin dalam perencanaan ekonomi tersentral melalui rencana pembangunan lima tahunan dengan target-target yang sangat ambisius, meski sering kali gagal tercapai. Di tengah upaya mempertahankan sistem ekonomi terkendali terpusat, pemerintah Korea Utara juga berusaha meningkatkan produksi di berbagai sektor strategis, seperti pertanian, industri, dan pertambangan, sebagai langkah untuk mencapai kemandirian ekonomi. Inisiatif-inisiatif ini, seperti program intensifikasi produksi pangan dan modernisasi fasilitas industri, seringkali terkendala oleh faktor-faktor eksternal, seperti sanksi

internasional, krisis kesehatan, dan bencana alam yang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendiversifikasi sumber pendapatan dengan mencari peluang-peluang ekonomi baru, seperti kerja sama di bidang senjata dengan Rusia dan negara-negara sekutu lainnya. Kebijakan pembatalan kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan juga merupakan langkah untuk mengurangi ketergantungan pada mitra tertentu dan mengurangi kerentanan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya reorientasi strategi ekonomi oleh pemerintah, dengan mengubah arah fokus dari ekspor ke arah kemandirian ekonomi dan pembangunan sektoral. Inisiatif-inisiatif baru, seperti pengembangan sektor pariwisata, teknologi informasi, dan ekonomi digital, diharapkan dapat memperluas basis ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional yang rentan terhadap tekanan eksternal.

Namun, langkah-langkah ini masih terbatas dan belum dapat mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi secara efektif. Secara keseluruhan, pemerintah Korea Utara terus berupaya menerapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi, namun tetap menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Dampak sanksi internasional, pandemi COVID-19, dan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, telah mempersulit upaya pemulihan dan pembangunan ekonomi. Menghadapi tekanan eksternal dan keterbatasan sumber daya, pemerintah Korea Utara tampaknya masih berusaha mencari formula yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun berbagai kendala yang terus menghadang.

Upaya-upaya pemerintah Korea Utara dalam mengatasi tantangan ekonomi dipersulit oleh adanya berbagai faktor eksternal yang saling terkait, seperti sanksi internasional yang membatasi akses pasar global, krisis kesehatan yang berdampak pada produktivitas, serta bencana alam yang merusak infrastruktur dan produksi dalam negeri. Di tengah tekanan-tekanan tersebut, pemerintah berupaya menerapkan berbagai langkah, seperti meningkatkan produksi di sektor-sektor strategis, mendiversifikasi sumber pendapatan, dan mencoba melakukan reorientasi strategi ekonomi. Namun,

langkah-langkah ini masih terbatas dan belum dapat mengatasi tantangan ekonomi secara komprehensif, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Isu Dominan

Beberapa isu dominan yang menjadi perhatian utama pemerintah Korea Utara saat ini di antaranya terkait tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19, bencana alam, dan sanksi ekonomi internasional yang menekan perekonomian Korea Utara. Pemerintah Korea Utara berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mencapai target-target pembangunan ekonomi. Isu kedua yang menjadi perhatian utama adalah fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi dan pencapaian ekonomi di tengah kondisi sulit. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk investasi ekonomi, mencapai 45 persen dari total belanja negara.

Isu ketiga yang muncul adalah alokasi anggaran yang besar untuk pertahanan dan pencegahan perang. Hal ini menunjukkan isu keamanan dan pertahanan masih menjadi prioritas utama pemerintah Korea Utara dalam strategi pembangunan nasional. Terakhir, upaya pemerintah untuk melindungi "budaya dialek Pyongyang" melalui undang-undang mengindikasikan adanya isu pemeliharaan identitas budaya nasional di tengah pengaruh luar, khususnya dari Korea Selatan.

Isu utama yang menonjol dalam Perekonomian korea utara, Terpusat dan Hindari Investasi Asing adalah sifat ekonomi Korea Utara yang sangat terpusat dan terkonsentrasi di bawah kendali ketat pemerintah. Pemerintah Korea Utara menjalankan kontrol yang kuat atas alokasi sumber daya, investasi, dan aktivitas perdagangan, sehingga tidak memberikan ruang bagi pasar bebas atau sektor swasta untuk berkembang. Selain itu, artikel juga menekankan upaya pemerintah Korea Utara untuk menghindari keterlibatan investasi asing dan interaksi ekonomi yang erat dengan luar negeri. Kebijakan ini mencerminkan keinginan Korea Utara untuk mempertahankan ekonomi yang terisolasi dan tidak tergantung pada pengaruh eksternal.

Korea Utara masih mengadopsi model *state-led development*, di mana pemerintah memegang kendali penuh atas perekonomian. Indikator yang bisa terlihat yakni kontraksi ekonomi yang terus berlanjut dan langkah-langkah pemerintah untuk mempertahankan

kontrol ketat atas sektor-sektor ekonomi utama. Strategi pemerintah Korea Utara di antaranya dengan memperkuat kontrol negara atas industri manufaktur, pertambangan, dan pertanian, meskipun sektor-sektor ini mengalami penurunan produksi yang signifikan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan hubungan perdagangan dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama, di mana Tiongkok menjadi mitra dagang utama dari Korea Utara. Isu dominan yang juga muncul adalah adanya kemunduran ekonomi Korea Utara yang terus berlanjut, ketergantungan yang tinggi pada mitra dagang tertentu, dan ketidakmampuan untuk meningkatkan standar hidup rakyat. Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa indikator perdagangan, seperti ekspor dan impor, namun ini tidak cukup untuk menutupi kesenjangan ekonomi yang besar antara Korea Utara dan Korea Selatan. Penurunan angka kelahiran, harapan hidup yang lebih pendek, dan asupan gizi yang kurang memadai menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi negara tidak mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi warganya.



**Kim Jong-un Sebut Ekonomi Korea Utara
Meningkat Signifikan**

Sumber: Metrotvnews.com

Isu meningkatnya ekonomi Korea Utara yang disampaikan langsung oleh Presiden Korea Utara Kim Jong-un saat pertemuan partai buruh pada selasa, 2 Juli 2024. Berdasarkan

sumber berita ketiga, dalam pertemuan partai, Korea Utara membahas lima agenda, termasuk tinjauan sementara atas pelaksanaan kebijakan negara tahun ini dan isu penegakan disiplin kerja di sektor- sektor utama, menurut KCNA. *"Di paruh pertama tahun ini, dapat dirasakan bahwa situasi ekonomi negara secara nyata mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,"* kata Kim Jong-un.

Menurut Administrasi Pengembangan Pedesaan Korea Selatan, diperkirakan produksi panen Korea Utara meningkat dari 310.000 ton per tahun menjadi 4,82 juta ton tahun lalu. Namun, jumlah ini masih di bawah 5,76 juta ton, jumlah produksi tahunan yang dibutuhkan Korea Utara untuk bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Korea Utara, menurut proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian untuk Korea Utara. Kim Jong-un juga mengatakan bahwa Korea Utara akan melihat penyelesaian basis produksi modern baru di 20 kota dan kabupaten pada akhir 2024. Hal ini terkait dengan proyek Korea Utara untuk membangun pabrik-pabrik modern di 20 kabupaten selama sepuluh tahun ke depan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Isu-isu lain yang juga dominan muncul dalam pemberitaan pada periode Januari 2022 hingga Juni 2024, seperti:

- 1) Pengembangan Senjata Nuklir oleh Korea Utara: Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua sebagai bagian dari strategi pertahanan dan *deterrence*. Kim Jong Un menyatakan bahwa pengembangan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman Amerika Serikat dan menghadapi sikap permusuhan Washington.
- 2) Negosiasi dengan Amerika Serikat: Korea Utara melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan denuklirisasi. Strategi negosiasi ini melibatkan penggunaan strategi *Problem Solving* dan *Contending* untuk memenuhi kepentingan nasional dalam kesepakatan tersebut.
- 3) Kebijakan Dengan Korea Selatan: Korea Selatan dan Amerika Serikat mengembangkan strategi bersama untuk menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara. Strategi ini melibatkan pengembangan pedoman untuk mempertahankan dan meningkatkan kebijakan dan postur penangkalan nuklir yang kredibel dan efektif.

4) Kebijakan Luar Negeri Era Kepemimpinan Kim Jong Un: Pemerintah Korea Utara mengembangkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea. Kebijakan ini mencakup pengembangan hubungan antar-Korea, pembangunan ekonomi, dan penyelesaian konflik melalui dialog damai.

Isu-isu ini menunjukkan bahwa Korea Utara terus berupaya untuk mempertahankan diri dan memenuhi kepentingan nasionalnya melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Resepsi/Tanggapan atas Kebijakan *State-led Development* Korea Utara

Beberapa tanggapan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Korea Utara, di mana munculnya skeptisme atas masa depan Korea Utara dikarenakan masih banyak masyarakat Korea Utara yang mengalami kelaparan, kekurangan gizi maupun masalah kesehatan lainnya. Korea Utara selama bertahun-tahun juga sangat bergantung kepada bantuan asing. *"Kemungkinan besar mereka (warga negara biasa) tidak akan mendapat banyak manfaat karena Korea Utara masih merupakan negara otokratis dengan banyak korupsi,"* kata Head of Europe, Country Risk di Fitch Solutions itu.

Persepsi masyarakat umum terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah Korea Utara sebagian besar negatif, mengingat adanya penurunan kualitas hidup dan kurangnya kebebasan ekonomi. Beberapa pihak di Korea Utara, seperti pelaku ekonomi swasta, merasa terhambat oleh kontrol ketat pemerintah yang membatasi inovasi dan pertumbuhan. Dari sudut pandang internasional, kebijakan *state-led development* yang diterapkan oleh Korea Utara dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Pengaruh kebijakan Korea Utara terhadap dinamika ekonomi politik di kawasan Asia Timur cukup signifikan. Ketergantungan Korea Utara pada Tiongkok untuk bantuan ekonomi dan diplomatik dapat memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga meningkatkan risiko ekonomi bila di masa depan Tiongkok mengalami ketidakstabilan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat memperparah ketegangan internasional dan menimbulkan tantangan tambahan bagi stabilitas politik di kawasan Asia Timur.

Kesimpulan

Korea Utara konsisten menerapkan model *state-led development*, di mana negara memegang kendali penuh atas alokasi sumber daya, investasi, dan sektor strategis seperti pertahanan dan pertanian. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan kontrol politik yang kuat dan mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai prioritas strategisnya. Namun, fokus utama pada keamanan nasional dan pembangunan militer membatasi kemampuan negara untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi masyarakat luas.

Tantangan eksternal seperti sanksi internasional, pandemi COVID-19, dan bencana alam semakin memperparah keterbatasan kapasitas implementasi kebijakan pemerintah. Ketergantungan pada mitra dagang eksternal, terutama Tiongkok dan Rusia, menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meskipun hal ini juga menimbulkan risiko geopolitik dan kerentanan terhadap perubahan kondisi internasional. Meskipun pemerintah Korea Utara melakukan berbagai upaya untuk modernisasi infrastruktur, diversifikasi sektor ekonomi, dan penguatan produksi domestik, efektivitas intervensi negara tetap terbatas. Model pembangunan yang dipimpin negara ini lebih berhasil dalam mempertahankan kontrol politik daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pembangunan *state-led development* di Korea Utara menekankan kemandirian politik dan keamanan, tetapi menghadapi batasan struktural dan eksternal yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup warga negara.

Daftar Pustaka

- Bennett, B. W. (2023). *North Korea–Russia defense cooperation: Implications for regional security.* RAND Corporation. Accessed from <https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/north-korea-russia-defense-cooperation.html>
- BBC News Indonesia. (2021). *Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akui rencana ekonomi*

- gagal capai sasaran. BBC News, Accessed from
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55572645>
- Center for Strategic and International Studies (CSIS) - Beyond Parallel. (n.d.). Beyond Parallel: Bringing transparency to Korean Peninsula issues.
<https://beyondparallel.csis.org/>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2013). *FAO/WFP crop and food security assessment mission to the Democratic People's Republic of Korea* (CFSAM report). Accessed from <https://www.fao.org/4/aq118e/aq118e.pdf>
- Food and Agriculture Organization (FAO). (n.d.). *FAO in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*. Accessed from <https://www.fao.org/democratic-peoples-republic-of-korea/en/>
- Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.
- Khoiriyah, S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Era Kepemimpinan Kim Jong Un dan Moon Jae In terhadap Resolusi Konflik Semenanjung Korea. *Journal of Diplomacy and International Studies*. Accessed from
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/12247/4988/42365>
- Kyodo-Oana. (2023). *Korut serukan capaian ekonomi di tengah tantangan pandemi*. Antara News, Accessed from
<https://www.antaranews.com/berita/3356940/korut-serukan-capaian-ekonomi-di-tengah-tantangan-pandemi>
- Lestari, B. U. S., Karjaya, L. P. and Sood, M. (2021). Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), pp. 81-109. Accessed from
<https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/32/18>
- Nabilah, S. (2024). *Kim Jong-un Sebut Ekonomi Korea Utara Meningkat Signifikan*. Metro TV News, Accessed from <https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5V5v-kim-jong-un-sebut-ekonomi-korea-utara-meningkat-signifikan>
- Noland, M. (2022). North Korea as a complex humanitarian emergency: Assessing food

- insecurity. *Asia and the Global Economy*, 2(3),
<https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2022.100049>
- Pahrudin HM. (n.d). *Diskursus Globalisasi dan Urgensi Peran Pemerintah Melalui Kebijakan Publik*. Accessed from <https://www.unja.ac.id/diskursus-globalisasi-dan-urgensi-peran-pemerintah-melalui-kebijakan-publik/>
- Reditya, T. H. (2021). *Perekonomian Korea Utara, Terpusat dan Hindari Investasi Asing*. Kompas, Accessed from <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/21/073000270/perekonomian-korea-utara-terpusat-dan-hindari-investasi-asing>
- Reditya, T. H. (2024). *Korea Utara Batalkan Semua Kerja Sama Ekonomi dengan Korea Selatan*. Kompas, Accessed from <https://www.kompas.com/global/read/2024/02/09/093838170/korea-utara-batalkan-semua-kerja-sama-ekonomi-dengan-korea-selatan>
- ReliefWeb. (2019). DPRK: FAO/WFP joint rapid assessment — North Korea food shortages (summary). Accessed from <https://reliefweb.int/report/democratic-peoples-republic-korea/democratic-peoples-republic-korea-dprk-fao-wfp-joint-rapid>
- Revere, E. J. (2021). *North Korea's new nuclear gambit and the fate of denuclearization*. (Brookings/analysis). Accessed from <https://www.brookings.edu/articles/north-koreas-new-nuclear-gambit-and-the-fate-of-denuclearization/>
- Song, H.-Y. (2006). *The developmental state and the neoliberal transition in South Korea*. In Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries. Routledge.
- United Nations Security Council. (2023). Reports of the Panel of Experts on DPRK sanctions (S/2023/171 and related reports)
- Winanti, P. S. (2003). Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Pengalaman Korea Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), pp. 175-204, Accessed from <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11071/8312>
- Yeon, K. J. (2023). *North Korea's economy contracts for third straight year*. Korea JoongAng Daily, Accessed from <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2023-12-24/national/northKorea/North-Koreas-economy-contracts-for-third-straight->

[year/1942619](#)

Yonhap-Oana. (2023). *Korea Utara buka lagi perbatasan karena kesulitan ekonomi*. Antara News, Accessed from <https://www.antaranews.com/berita/3700158/korea-utara-buka-lagi-perbatasan-karena-kesulitan-ekonomi>.